E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4053-4064
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Pulau Sulawesi Melalui Perspektif Makroekonomi Kemiskinan, Inflasi Dan Investasi

Dheavivi Ayu Dian Pebrian [1], Puspa Dewangga[2]

[1,2] Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Halu Oleo
e-mail: dheaviviayudian@uho.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang tinggi, terutama didorong industri pengolahan berbasis nikel, belum diikuti penurunan kemiskinan yang sepadan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, inflasi, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Sulawesi periode 2015–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel seimbang sebanyak 60 observasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Investasi/BKPM. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, inflasi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh signifikan secara simultan. Hubungan positif kemiskinan dengan pertumbuhan mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspansi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meskipun mekanisme penyebabnya belum dapat dipastikan melalui model ini. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan kebijakan ekonomi di Sulawesi bukan semata-mata mempercepat pertumbuhan, tetapi mengubah pertumbuhan menjadi pertumbuhan yang inklusif. Implikasi kebijakannya meliputi penguatan keterkaitan investasi dengan tenaga kerja dan usaha lokal, pengendalian inflasi pangan yang melindungi daya beli rumah tangga miskin, serta pengarahan belanja dan insentif fiskal daerah ke wilayah dan sektor tempat penduduk miskin bekerja.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Kemiskinan; Inflasi; Investasi.

Abstract

The high economic growth in Sulawesi, driven primarily by the nickel-based processing industry, has not been accompanied by a commensurate reduction in poverty. This study aims to analyze the impact of poverty, inflation, and investment on the economic growth of the six provinces on the island of Sulawesi during the 2015–2024 period. A quantitative approach was employed, utilizing a balanced panel dataset of 60 observations sourced from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Investment/BKPM. The analysis was conducted using panel data regression in EViews 12. The results indicate that poverty, inflation, and investment have a positive and significant impact on economic growth, both individually and simultaneously. The positive relationship between poverty and economic growth suggests a gap between economic expansion and public welfare, although the underlying mechanisms cannot be definitively determined through this model. These findings underscore that the challenge for economic policy in Sulawesi is not merely to accelerate growth, but to transform it into inclusive growth. Policy implications include strengthening the linkages between investment and the local workforce and businesses, controlling food inflation to protect the purchasing power of poor households, and directing regional government spending and fiscal incentives toward the areas and sectors where the poor are employed.

Keywords: Economy Growth; Poverty; Inflation; Investment.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan peningkatan kapasitas suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Namun, literatur pembangunan modern menegaskan bahwa tingginya laju pertumbuhan tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Kuznets (1955) telah lama menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan dapat disertai ketimpangan yang melebar, sementara Ravallion (2001) membuktikan bahwa besar kecilnya dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh distribusi pendapatan awal dan pola sektoral pertumbuhan itu sendiri. Pertanyaan kebijakan yang relevan bukan hanya seberapa cepat suatu daerah tumbuh, tetapi juga bagaimana dan untuk siapa pertumbuhan itu terjadi.

Pulau Sulawesi merupakan contoh nyata dari persoalan tersebut. Selama periode 2015–2024, rata-rata pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Sulawesi mencapai 6,06 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada pada kisaran 5 persen di luar masa pandemi. Kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh rata-rata 11,55 persen per tahun, dengan puncak 20,60 persen pada 2018 dan 15,22 persen pada 2022. Lonjakan ini berkaitan erat dengan kebijakan hilirisasi nikel dan beroperasinya kawasan industri smelter di Kabupaten Morowali. Martain dan Nugroho (2026) mencatat bahwa PDRB Kabupaten Morowali meningkat dari sekitar Rp120 triliun pada 2016 menjadi hampir Rp377 triliun pada 2024, dan pangsanya terhadap PDRB Sulawesi Tengah naik dari sekitar 12 persen menjadi sekitar 46 persen.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Sulawesi masih relatif tinggi. Rata-rata persentase penduduk miskin di enam provinsi pada periode penelitian mencapai 11,56 persen, dengan Gorontalo (rata-rata 16,24 persen) dan Sulawesi Tengah (rata-rata 13,32 persen) sebagai dua provinsi dengan kemiskinan tertinggi. Kemiskinan memang menurun, dari rata-rata 12,64 persen pada 2015 menjadi 10,60 persen pada 2024, tetapi laju penurunannya jauh lebih lambat dibandingkan percepatan output regional. Sulawesi Tengah, sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, hanya menurunkan kemiskinan dari 14,66 persen menjadi 11,77 persen dalam sepuluh tahun.

Selain kemiskinan, dinamika harga dan arus modal turut membentuk pertumbuhan regional. Inflasi di Sulawesi selama 2015–2024 rata-rata sebesar 3,22 persen dan relatif terkendali, meskipun sempat meningkat pada 2022 ketika penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi pada September 2022 mendorong inflasi nasional mencapai 5,95 persen (*year-on-year*) pada bulan tersebut (Bisnis.com, 2022). Sementara itu, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) cenderung meningkat, terutama di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang menjadi tujuan utama investasi smelter. Secara teoretis, investasi merupakan sumber utama akumulasi modal dan pertumbuhan (Harrod, 1939; Domar, 1946; Solow, 1956), sedangkan hubungan inflasi dengan pertumbuhan bersifat nonlinier, yaitu positif pada tingkat rendah hingga moderat dan negatif setelah melewati ambang batas tertentu (Khan & Senhadji, 2001; Kusumatrisna et al., 2019).

Kajian empiris mengenai hubungan kemiskinan, inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Fadhlilhaq et al. (2024) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali, sedangkan Montilamo et al. (2025) serta Pratama dan Supriadin (2025) menemukan pengaruh negatif. Pada tingkat regional Sulawesi, Rosalina et al. (2026) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru belum efektif menurunkan kemiskinan karena persoalan distribusi, sementara Zufarulhaq dan Damayati (2025) menemukan bahwa dampak smelter nikel terhadap penurunan kemiskinan baru muncul secara tertunda beberapa tahun setelah

smelter beroperasi. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemiskinan dan pertumbuhan sangat kontekstual dan perlu dibaca melalui struktur ekonomi wilayah.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, inflasi, dan investasi, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi periode 2015–2024. Selain itu, mengembangkan pembahasan hasil estimasi tersebut menjadi implikasi kebijakan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan inklusif.

Landasan Teori

Pertumbuhan ekonomi dan investasi

Teori Harrod–Domar menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh rasio tabungan (investasi) terhadap output dibagi dengan rasio modal-output (Harrod, 1939; Domar, 1946). Investasi memiliki peran ganda, yaitu menciptakan permintaan agregat dalam jangka pendek dan menambah kapasitas produksi dalam jangka panjang. Solow (1956) melengkapi pandangan tersebut dengan menekankan bahwa akumulasi modal fisik mendorong pertumbuhan hingga mencapai kondisi mantap, sementara Mankiw et al. (1992) menambahkan peran modal manusia sebagai faktor yang memperbesar daya jelas model pertumbuhan neoklasik. Dalam konteks daerah, Hirschman (1958) mengingatkan bahwa dampak investasi terhadap perekonomian lokal bergantung pada kuatnya keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan ke depan (*forward linkages*) dengan sektor-sektor lain.

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

Hubungan kemiskinan dan pertumbuhan dapat dijelaskan melalui beberapa jalur. Nurkse (1953) melalui konsep lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menjelaskan bahwa pendapatan rendah menyebabkan tabungan dan investasi rendah sehingga pertumbuhan tertahan. Sebaliknya, model ekonomi dualistik Lewis (1954) menunjukkan bahwa dalam perekonomian dengan surplus tenaga kerja, pertumbuhan dapat berlangsung cepat di sektor modern, sementara sebagian besar penduduk tetap berada di sektor tradisional yang berproduktivitas rendah. Dalam kerangka ini, pertumbuhan tinggi dan kemiskinan tinggi dapat terjadi bersamaan selama sektor modern belum menyerap tenaga kerja dalam jumlah memadai. Konsep pertumbuhan pro-masyarakat miskin (*pro-poor growth*) kemudian dikembangkan untuk menilai apakah pertumbuhan memberikan manfaat proporsional bagi kelompok miskin (Ravallion & Chen, 2003).

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Keynes (1936) memandang kenaikan harga yang bersumber dari meningkatnya permintaan agregat (*demand-pull inflation*) sebagai gejala ekspansi ekonomi, terutama ketika perekonomian belum berada pada kapasitas penuh. Di sisi lain, Fischer (1993) menunjukkan bahwa inflasi tinggi menciptakan ketidakpastian yang merugikan investasi dan pertumbuhan. Kedua pandangan tersebut didamaikan oleh literatur ambang batas inflasi. Khan dan Senhadji (2001) menemukan ambang batas sekitar 1–3 persen untuk negara maju dan 11–12 persen untuk negara berkembang, sedangkan Kusumatrisna et al. (2019) menemukan bahwa pada tingkat provinsi di Indonesia, inflasi mulai memperlambat pertumbuhan setelah melampaui sekitar 5,09 persen dan berdampak negatif nyata di atas sekitar 9,57–9,59 persen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori dengan menggunakan data sekunder berbentuk data panel seimbang (*balanced panel*). Unit analisis terdiri atas enam provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, dengan rentang waktu 2015–2024 sehingga diperoleh 60 observasi. Data laju pertumbuhan PDRB, persentase penduduk miskin, dan inflasi tahunan bersumber dari Badan Pusat Statistik sedangkan data realisasi investasi PMA dan PMDN bersumber dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi

Penanaman Modal. Data pendukung berupa dokumen, literatur, dan artikel jurnal digunakan untuk memperkuat interpretasi hasil. Model empiris penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 LnX3_{it}$$

dengan Y_{it} adalah pertumbuhan ekonomi provinsi *i* pada tahun *t*; α adalah konstanta; β_1, β_2, β_3 adalah koefisien regresi; X1 adalah kemiskinan; X2 adalah inflasi; X3 logaritma natural investasi. Pemilihan model estimasi terbaik di antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dilakukan melalui tiga tahap pengujian (Baltagi, 2021; Napitupulu et al., 2021). Selanjutnya tahap uji koefisien determinasi, uji F (simultan), dan uji t (parsial) pada taraf signifikansi 5 persen.

Hipotesis penelitian ini adalah: (H1) kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi; (H2) inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi; (H3) investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi; dan (H4) investasi, inflasi, dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Variabel Penelitian

Tabel 1 menyajikan rata-rata variabel penelitian menurut provinsi beserta statistik deskriptif gabungan. Terlihat adanya heterogenitas yang besar antarprovinsi. Sulawesi Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi (11,55 persen) sekaligus rata-rata investasi tertinggi (Ln 17,50), tetapi tingkat kemiskinannya (13,32 persen) berada di urutan kedua tertinggi setelah Gorontalo. Sebaliknya, Sulawesi Utara memiliki tingkat kemiskinan terendah (7,78 persen) dengan pertumbuhan yang moderat (4,97 persen). Pola ini memberikan indikasi awal bahwa provinsi dengan pertumbuhan tercepat belum tentu merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Menurut Provinsi, 2015–2024 (Rata-rata)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kemiskinan (%)	Inflasi (%)	Ln Investasi
Sulawesi Tengah	11,55	13,32	3,52	17,50
Sulawesi Selatan	5,43	8,88	3,20	16,34
Sulawesi Tenggara	5,28	11,79	3,30	16,37
Sulawesi Utara	4,97	7,78	2,95	15,71
Gorontalo	4,74	16,24	2,95	14,53
Sulawesi Barat	4,41	11,36	3,40	13,93
Rata-rata Sulawesi	**6,06**	**11,56**	**3,22**	**15,73**
Simpangan baku	3,72	2,91	1,60	1,39
Minimum	−2,34 (Sulbar, 2020)	7,25 (Sulut, 2024)	−0,18 (Sulut, 2020)	12,11 (Gorontalo, 2015)
Maksimum	20,60 (Sulteng, 2018)	18,32 (Gorontalo, 2015)	7,55 (Sulteng, 2018)	18,76 (Sulteng, 2024)

Sumber: BPS dan Kementerian Investasi/BKPM, diolah (2026).

Dari sisi waktu, pertumbuhan ekonomi rata-rata Sulawesi turun tajam menjadi 0,03 persen pada 2020 akibat pandemi COVID-19, bersamaan dengan rendahnya inflasi rata-rata (1,54 persen) karena melemahnya permintaan. Pada 2022, inflasi rata-rata naik menjadi 4,94 persen seiring pemulihan permintaan dan penyesuaian harga BBM, sementara pertumbuhan rata-rata kembali menguat menjadi 6,27 persen. Pergerakan searah antara inflasi dan pertumbuhan pada kedua titik waktu tersebut menjadi latar penting bagi interpretasi hasil estimasi.

Pemilihan Model Estimasi

Uji Chow

Hasil pengujian pemilihan model disajikan pada Tabel 2. Uji Chow menghasilkan probabilitas *cross-section* F sebesar 0,0011 dan *cross-section chi-square* sebesar 0,0003, keduanya lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik spesifik antarprovinsi yang tidak dapat diabaikan.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.835561	(5,51)	0.0011
Cross-section Chi-square	23.281826	5	0.0003

Sumber: Hasil olah data EViews 12 (2026).

Uji Hausman

Uji Hausman menghasilkan statistik *chi-square* sebesar 5,606 dengan probabilitas 0,1324 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan REM lebih tepat dibandingkan FEM.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.606458	3	0.1324

Sumber: Hasil olah data EViews 12 (2026).

Pemilihan REM juga sesuai secara substantif karena enam provinsi di Sulawesi dapat dipandang sebagai bagian dari populasi wilayah yang lebih luas, dan efek spesifik provinsi diperlakukan sebagai komponen acak (Baltagi, 2021).

Uji Asumsi Klasik

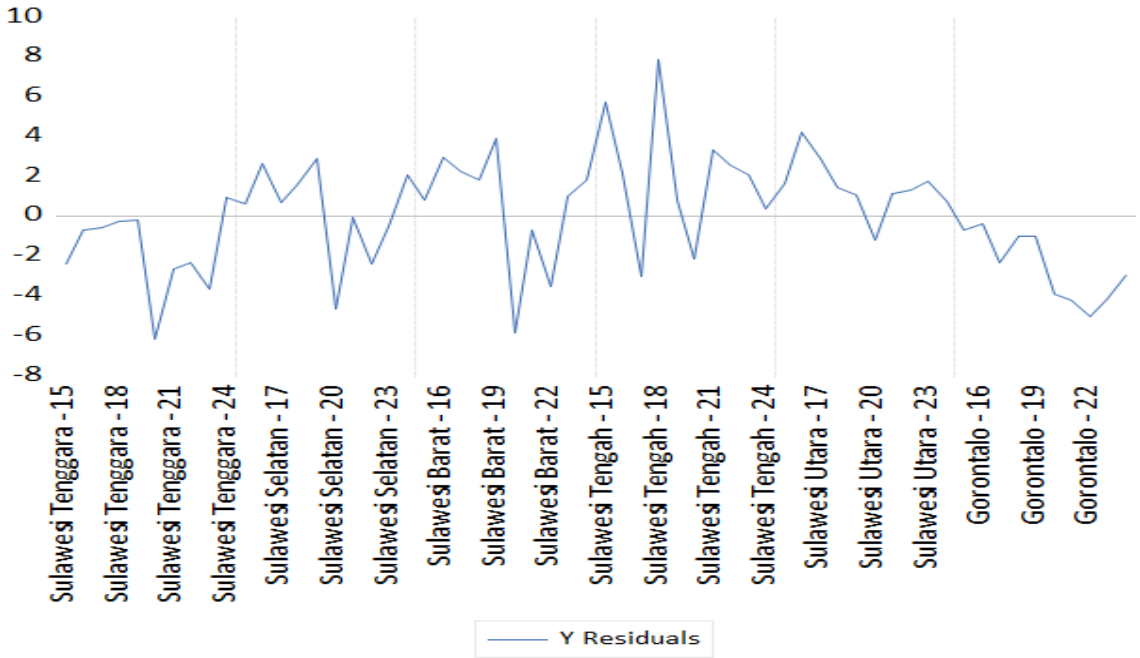
Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antarvariabel bebas berada jauh di bawah 0,90, yaitu 0,0744 antara kemiskinan dan inflasi, −0,2334 antara kemiskinan dan investasi, serta −0,0962 antara inflasi dan investasi. Dengan demikian, model terbebas dari masalah multikolinearitas (Gujarati & Porter, 2009; Napitupulu et al., 2021).

Tabel 4. Matriks Korelasi Antarvariabel Bebas

Variabel	X1 (Kemiskinan)	X2 (Inflasi)	X3 (Ln Investasi)
X1 (Kemiskinan)	1,0000	0,0744	−0,2334
X2 (Inflasi)	0,0744	1,0000	−0,0962
X3 (Ln Investasi)	−0,2334	−0,0962	1,0000

Sumber: Hasil olah data EViews 12 (2026).

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memeriksa grafik residual (Gambar 1). Residual berfluktuasi di sekitar nilai nol dalam rentang kurang lebih −8 hingga 8 dan tidak membentuk pola sistematis tertentu, seperti pola melebar atau menyempit, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians residual relatif konstan dan model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1. Grafik Residual Model

Sumber: Hasil olah data EViews 12 (2026).

Hasil Estimasi Random Effect Model

Hasil estimasi REM disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = -22{,}944 + 0{,}622X1_{it} + 0{,}917X2_{it} + 1{,}200LnX3_{it} \quad (2)$$

Tabel 5. Hasil Estimasi Random Effect Model

Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.94398	8.296459	-2.765515	0.0077
X1	0.621567	0.256212	2.425983	0.0185
X2	0.916905	0.202136	4.536075	0.0000
X3	1.199545	0.418056	2.869340	0.0058

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	1.804579	0.3610
Idiosyncratic random	2.400903	0.6390

Weighted Statistics			
R-squared	0.330990	Mean dependent var	2.351948
Adjusted R-squared	0.295150	S.D. dependent var	2.925534
S.E. of regression	2.456141	Sum squared resid	337.8273
F-statistic	9.235259	Durbin-Watson stat	2.037037
Prob(F-statistic)	0.000047		

Sumber: Hasil olah data EViews 12 (2026). Metode: Panel EGLS (*cross-section random effects*).

Nilai *R-squared* sebesar 0,331 menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi provinsi di Sulawesi dapat dijelaskan oleh kemiskinan, inflasi, dan investasi sebesar 33,1 persen, sedangkan 66,9 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, misalnya belanja pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, harga komoditas global, serta guncangan seperti pandemi. Nilai koefisien determinasi ini wajar untuk model pertumbuhan regional yang menggunakan data laju pertumbuhan tahunan yang berfluktuasi tinggi.

Uji F menghasilkan nilai F-statistik sebesar 9,235 dengan probabilitas 0,000047 < 0,05, sehingga kemiskinan, inflasi, dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (H4 diterima). Secara parsial, kemiskinan memiliki koefisien 0,621567 dengan probabilitas 0,0185 < 0,05 (H1 diterima); inflasi memiliki koefisien 0,916905 dengan probabilitas 0,0000 < 0,05 (H2 diterima); dan investasi memiliki koefisien 1,199545 dengan probabilitas 0,0058 < 0,05 (H3 diterima). Ketiga variabel berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

Koefisien kemiskinan sebesar 0,621567 berarti bahwa, dengan asumsi variabel lain konstan, provinsi atau tahun dengan persentase penduduk miskin 1 poin persen lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi 0,62 persen lebih tinggi. Koefisien positif tersebut tidak dapat dimaknai bahwa kemiskinan menyebabkan atau mendorong pertumbuhan. Kemiskinan adalah variabel keadaan (*state variable*) yang berubah lambat, sedangkan pertumbuhan adalah variabel laju yang berfluktuasi. Karena itu, koefisien positif lebih tepat dipahami sebagai asosiasi struktural: di Sulawesi, wilayah-wilayah yang tumbuh paling cepat justru merupakan wilayah yang masih menanggung tingkat kemiskinan relatif tinggi.

Pola tersebut terlihat jelas pada data, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan 20,60 persen pada 2018 dan 15,22 persen pada 2022, namun tingkat kemiskinannya masih 14,01 persen dan 12,33 persen pada tahun yang sama. Hal ini terjadi karena sumber pertumbuhan

Sulawesi Tengah adalah industri pengolahan nikel yang sangat padat modal dan terkonsentrasi secara spasial. Martain dan Nugroho (2026) mencatat bahwa pangsa industri pengolahan dalam perekonomian Morowali meningkat dari sekitar 12 persen menjadi lebih dari 70 persen pada 2024, sementara Kecamatan Bahodopi yang menjadi lokasi kawasan industri masih tertinggal dalam infrastruktur, tata kota, dan layanan publik, sehingga kawasan industri tersebut menunjukkan karakter enklave dengan limpahan (*spillover*) yang terbatas. Pradana et al. (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun pembangunan smelter menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan, manfaat tersebut disertai persoalan sosial dan lingkungan yang dapat menggerus kesejahteraan masyarakat sekitar.

Temuan ini konsisten dengan model dualistik Lewis (1954). Pertumbuhan terjadi melalui ekspansi sektor modern yang produktivitasnya tinggi, sedangkan sebagian besar penduduk miskin tetap bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan informal yang produktivitasnya rendah. Selama penyerapan tenaga kerja sektor modern terbatas dan sebagian tenaga kerjanya berasal dari luar daerah, nilai tambah yang tercatat dalam PDRB tidak sepenuhnya mengalir menjadi pendapatan rumah tangga lokal.

Gorontalo memperlihatkan sisi lain dari paradoks yang sama. Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (rata-rata 16,24 persen) dengan pertumbuhan yang moderat dan investasi yang relatif kecil. Kemiskinan di Gorontalo lebih bersifat struktural dan berkaitan dengan dominasi sektor pertanian berproduktivitas rendah, sehingga kemiskinan di Sulawesi tidak hanya merupakan persoalan provinsi yang tumbuh cepat, tetapi juga provinsi yang belum memiliki mesin pertumbuhan baru. Temuan positif kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan di Sulawesi belum memenuhi kriteria pertumbuhan pro-masyarakat miskin karena manfaat pertumbuhan belum dinikmati secara proporsional oleh kelompok miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fadhlilhaq et al. (2024) yang menemukan pengaruh positif kemiskinan terhadap pertumbuhan, serta diperkuat oleh Rosalina et al. (2026) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi belum efektif menurunkan kemiskinan karena masalah distribusi. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan Montilamo et al. (2025) serta Pratama dan Supriadin (2025) yang menemukan pengaruh negatif, dan dengan Kartini dan Yun (2024) yang menemukan bahwa pertumbuhan menurunkan kemiskinan pada tingkat provinsi secara nasional. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh cakupan wilayah: penelitian berskala nasional merata-ratakan provinsi dengan struktur ekonomi yang beragam, sedangkan Sulawesi memiliki konsentrasi pertumbuhan berbasis sumber daya alam yang sangat menonjol. Temuan Zufarulhaq dan Damayati (2025) bahwa dampak smelter terhadap penurunan kemiskinan muncul secara tertunda memberikan harapan bahwa paradoks ini dapat dipersempit, tetapi hanya jika kebijakan secara aktif mempercepat transmisi manfaat pertumbuhan.

Dari sudut pandang kebijakan ekonomi, temuan ini memiliki implikasi penting. Target pembangunan daerah di Sulawesi tidak cukup hanya menetapkan laju pertumbuhan, tetapi perlu disertai target elastisitas penurunan kemiskinan terhadap pertumbuhan. Kebijakan investasi harus dikaitkan dengan kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pemasok, serta program peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di wilayah dengan kemiskinan struktural seperti Gorontalo dan Sulawesi Barat, kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas pangan dan perkebunan rakyat, serta perbaikan akses pasar, sehingga pertumbuhan bersumber dari sektor tempat penduduk miskin bekerja (World Bank, 2023).

Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Koefisien inflasi sebesar 0,916905 menunjukkan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1 poin persen berasosiasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,91 persen, *ceteris paribus*. Inflasi merupakan variabel dengan tingkat signifikansi paling kuat dalam model (t = 4,536). Temuan ini sejalan dengan pandangan Keynesian bahwa inflasi tarikan permintaan merupakan gejala meningkatnya aktivitas ekonomi: ketika permintaan agregat

meningkat, produsen menaikkan produksi dan harga secara bersamaan sehingga output dan inflasi bergerak searah (Keynes, 1936).

Data penelitian menunjukkan bahwa inflasi di Sulawesi selama 2015–2024 berada pada rentang −0,18 hingga 7,55 persen dengan rata-rata 3,22 persen. Tingkat ini berada di bawah ambang batas negatif yang ditemukan Kusumatrisna et al. (2019) untuk provinsi di Indonesia (sekitar 9,57–9,59 persen) dan jauh di bawah ambang batas 11–12 persen untuk negara berkembang menurut Khan dan Senhadji (2001). Pada rentang tersebut, inflasi belum menimbulkan ketidakpastian yang merusak investasi sebagaimana dikhawatirkan Fischer (1993), melainkan masih mencerminkan dinamika permintaan. Pola ini tampak jelas pada dua titik waktu: pada 2020, inflasi rata-rata turun menjadi 1,54 persen bersamaan dengan kontraksi pertumbuhan akibat pandemi, sedangkan pada 2022 inflasi rata-rata naik menjadi 4,94 persen bersamaan dengan pemulihan pertumbuhan. Sulawesi Tengah pada 2022 mencatat inflasi 6,21 persen dan pertumbuhan 15,22 persen, sementara Sulawesi Selatan mencatat inflasi 5,77 persen dengan pertumbuhan 5,10 persen.

Hasil ini sejalan dengan Aulia et al. (2017) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi berbeda dengan Montilamo et al. (2025) yang menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan, serta Pratama dan Supriadin (2025) yang menemukan pengaruh negatif. Perbedaan tersebut wajar mengingat sifat nonlinier hubungan inflasi dan pertumbuhan: penelitian dengan periode yang mencakup inflasi tinggi, seperti krisis 1998, cenderung menemukan pengaruh negatif, sedangkan periode 2015–2024 merupakan era inflasi rendah dan terkendali dalam kerangka *inflation targeting*.

Namun, dari perspektif pertumbuhan inklusif, temuan positif inflasi bukan berarti dibaca sebagai pembenaran untuk membiarkan inflasi meningkat. Rumah tangga miskin membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk pangan, sehingga kenaikan harga pangan dan energi secara langsung menggerus daya beli mereka. Dengan kata lain, inflasi yang “aman” bagi pertumbuhan agregat belum tentu aman bagi kesejahteraan penduduk miskin. Kusumatrisna et al. (2019) bahkan menunjukkan bahwa pertumbuhan provinsi mulai melambat ketika inflasi melampaui sekitar 5,09 persen, suatu tingkat yang sempat didekati atau dilampaui beberapa provinsi Sulawesi pada 2015, 2018, dan 2022. Oleh karena itu, implikasi kebijakannya adalah menjaga inflasi pada rentang sasaran nasional melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penguatan cadangan pangan daerah, kelancaran distribusi antarpulau, dan kerja sama antardaerah, sehingga inflasi tetap mencerminkan aktivitas ekonomi tanpa menekan daya beli kelompok miskin.

Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Koefisien investasi sebesar 1,199545 merupakan koefisien terbesar dalam model. Karena investasi dinyatakan dalam logaritma natural, koefisien ini berarti bahwa kenaikan realisasi investasi sebesar 10 persen berasosiasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,12 persen, dan penggandaan nilai investasi berasosiasi dengan peningkatan pertumbuhan sekitar 0,83 poin persen, *ceteris paribus*. Temuan ini konsisten dengan teori Harrod–Domar dan Solow bahwa akumulasi modal merupakan sumber utama pertambahan kapasitas produksi (Harrod, 1939; Domar, 1946; Solow, 1956).

Secara empiris, hubungan tersebut tercermin dari Sulawesi Tengah yang memiliki rata-rata investasi tertinggi (17,50) dan pertumbuhan tertinggi, dengan nilai investasi yang terus meningkat hingga mencapai 18,76 pada 2024. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 dan pengembangan kawasan industri berbasis smelter telah menarik arus investasi besar yang mendorong lonjakan output industri pengolahan (Martain & Nugroho, 2026). Sebaliknya, Sulawesi Barat dan Gorontalo yang memiliki rata-rata investasi terendah (13,93 dan 14,53) juga mencatat pertumbuhan rata-rata terendah.

Meskipun demikian, temuan pada bagian kemiskinan menunjukkan bahwa investasi yang mendorong pertumbuhan belum tentu mendorong pengurangan kemiskinan secara sepadan. Menurut Hirschman (1958), besarnya manfaat investasi bagi perekonomian lokal

ditentukan oleh kekuatan keterkaitan ke belakang dan ke depan. Investasi smelter yang mengimpor sebagian besar barang modal, menggunakan teknologi padat modal, dan mengekspor produk setengah jadi memiliki keterkaitan lokal yang terbatas. Karena itu, kebijakan investasi di Sulawesi perlu bergeser dari orientasi kuantitas menuju orientasi kualitas, yaitu investasi yang menciptakan lapangan kerja lokal, mengembangkan industri pendukung, dan menyebar ke sektor-sektor lain seperti agroindustri, perikanan, dan pariwisata yang lebih banyak melibatkan penduduk miskin.

Pengaruh simultan dan sintesis kebijakan

Secara simultan, kemiskinan, inflasi, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Sulawesi. Ketiga variabel membentuk satu gambaran yang utuh: pertumbuhan Sulawesi digerakkan oleh investasi besar yang terkonsentrasi, berlangsung dalam lingkungan inflasi moderat yang mencerminkan ekspansi permintaan, tetapi terjadi di wilayah-wilayah yang masih menanggung kemiskinan tinggi. Sintesis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Sulawesi berkualitas tinggi dari sisi kuantitas output, tetapi masih rendah dari sisi inklusivitas.

Implikasinya, kebijakan ekonomi regional di Sulawesi perlu dirancang sebagai satu paket yang terintegrasi. Kebijakan investasi menjadi penggerak pertumbuhan, kebijakan stabilisasi harga menjadi pelindung daya beli, dan kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi saluran transmisi agar pertumbuhan dirasakan oleh masyarakat. Tanpa saluran transmisi tersebut, pertumbuhan tinggi akan terus berdampingan dengan kemiskinan tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan, inflasi, dan investasi secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Sulawesi periode 2015–2024. Pengaruh positif kemiskinan tidak menunjukkan bahwa kemiskinan mendorong pertumbuhan, melainkan mencerminkan paradoks pertumbuhan tanpa pengentasan kemiskinan, yaitu pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor padat modal berbasis sumber daya alam, khususnya industri pengolahan nikel, sehingga provinsi dengan pertumbuhan tinggi seperti Sulawesi Tengah tetap memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi, sementara provinsi dengan kemiskinan struktural seperti Gorontalo belum memiliki sumber pertumbuhan baru. Pengaruh positif inflasi menunjukkan bahwa inflasi di Sulawesi masih berada pada tingkat moderat dan bersumber dari ekspansi permintaan, sehingga bergerak searah dengan aktivitas ekonomi dan belum melampaui ambang batas yang merugikan pertumbuhan. Investasi merupakan determinan dengan koefisien terbesar dan menjadi motor utama pertumbuhan regional, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya tertransmisikan kepada penduduk miskin karena lemahnya keterkaitan investasi dengan perekonomian lokal. Sehingga tantangan utama kebijakan ekonomi di Sulawesi bukan lagi mempercepat pertumbuhan, melainkan meningkatkan kualitas dan inklusivitas pertumbuhan.

SARAN

Pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi disarankan untuk menjadikan inklusivitas sebagai sasaran eksplisit kebijakan pembangunan dengan menetapkan target penurunan kemiskinan yang terukur di samping target pertumbuhan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan investasi perlu diarahkan pada kualitas melalui persyaratan penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan wajib antara investor dan UMKM pemasok, serta program vokasi dan pelatihan keterampilan yang disusun bersama dunia industri, khususnya di kawasan industri nikel Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan TPID perlu menjaga inflasi pada rentang sasaran dengan memprioritaskan stabilitas harga pangan dan energi melalui penguatan cadangan pangan, kelancaran logistik antarpulau, dan kerja sama antardaerah, karena kelompok miskin paling rentan terhadap kenaikan harga. Bagi provinsi dengan kemiskinan struktural seperti

Gorontalo dan Sulawesi Barat, kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas rakyat, serta perbaikan infrastruktur perdesaan agar tercipta sumber pertumbuhan yang melibatkan penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, S., Saleh, M., & Roy, J. (2017). Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, *2*(3).

Badan Pusat Statistik. (2025). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2015–2024*. BPS. Https://Www.Bps.Go.Id

Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2015–2024*. BPS. Https://Www.Bps.Go.Id

Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat Inflasi Tahunan (Year-On-Year) Menurut Provinsi (Persen), 2015–2024*. BPS. Https://Www.Bps.Go.Id

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis Of Panel Data* (6th Ed.). Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-030-53953-5

Bisnis.Com. (2022, Oktober 4). *Inflasi 5,95 Persen, Bank Indonesia Ingatkan Second Round Effect*. Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20221004/9/1583915/Inflasi-595-Persen-Bank-Indonesia-Ingatkan-Second-Round-Effect

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test And Its Applications To Model Specification In Econometrics. *The Review Of Economic Studies*, *47*(1), 239–253. Https://Doi.Org/10.2307/2297111

Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate Of Growth, And Employment. *Econometrica*, *14*(2), 137–147. Https://Doi.Org/10.2307/1905364

Fadhlilhaq, T., Zahroh, F., Taufiq, M., & Oktafia, R. (2024). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Bali. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(19), 904–915. Https://Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/JIWP/Article/View/8318

Fischer, S. (1993). The Role Of Macroeconomic Factors In Growth. *Journal Of Monetary Economics*, *32*(3), 485–512. Https://Doi.Org/10.1016/0304-3932(93)90027-D

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th Ed.). Mcgraw-Hill/Irwin.

Harrod, R. F. (1939). An Essay In Dynamic Theory. *The Economic Journal*, *49*(193), 14–33. Https://Doi.Org/10.2307/2225181

Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy Of Economic Development*. Yale University Press.

Kartini, & Yun, W. S. (2024). Quality Growth In Poverty Reduction Provinces In Indonesia. *Ecces: Economics Social And Development Studies*, *11*(2), 166–190. Https://Doi.Org/10.24252/Ecc.V11i2.51803

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025). *Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Menurut Provinsi, 2015–2024*. Kementerian Investasi/BKPM. Https://Www.Bkpm.Go.Id

Keynes, J. M. (1936). *The General Theory Of Employment, Interest And Money*. Macmillan.

Khan, M. S., & Senhadji, A. S. (2001). Threshold Effects In The Relationship Between Inflation And Growth. *IMF Staff Papers*, *48*(1), 1–21. Https://Doi.Org/10.2307/4621658

Kusumatrisna, A. L., Sugema, I., & Pasaribu, S. H. (2019). Efek Threshold Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *27*(1), 43–52. Https://Doi.Org/10.14203/JEP.27.1.2019.43-52

Kuznets, S. (1955). Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Review*, *45*(1), 1–28. Https://Www.Jstor.Org/Stable/1811581

Lewis, W. A. (1954). Economic Development With Unlimited Supplies Of Labour. *The Manchester School*, *22*(2), 139–191. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9957.1954.Tb00021.X

Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution To The Empirics Of Economic Growth. *The Quarterly Journal Of Economics*, *107*(2), 407–437. Https://Doi.Org/10.2307/2118477

Martain, M., & Nugroho, H. (2026). Downstreaming As A Game Changer For Indonesia's Reindustrialization. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, *10*(1), 1–4. Https://Doi.Org/10.36574/Jpp.V10i1.843

Montilamo, S. H., Natsir, M., & Suriadi, L. O. (2025). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1993–2023. *Jurnal Ekonomi (JE)*, *10*(1), 72–80.

Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., & Lamminar. (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik Dan Analisis Data Dengan SPSS–STATA–Eviews*. Madenatera.

Nurkse, R. (1953). *Problems Of Capital Formation In Underdeveloped Countries*. Basil Blackwell.

Pradana, G. W., Kuncaravita, S. A., & Alina, A. N. (2024). Policy And Impact Analysis Of Smelter Development In Morowali Sulawesi: A Multidisciplinary Review Of Social, Economic And Environmental Aspects. *East Asian Policy*, *16*(4), 114–127. Https://Doi.Org/10.1142/S1793930524000327

Pratama, D., & Supriadin. (2025). Pengaruh Inflasi, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Of Economics Development Research*, *1*(1), 8–17.

Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality And Poverty: Looking Beyond Averages. *World Development*, *29*(11), 1803–1815. Https://Doi.Org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9

Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring Pro-Poor Growth. *Economics Letters*, *78*(1), 93–99. Https://Doi.Org/10.1016/S0165-1765(02)00205-7

Rosalina, L., Listia, & Heriqbaldi, U. (2026). The Role Of Economic Growth And Income Inequality On Poverty Levels In Sulawesi: A Panel Data Regression Approach. *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business*, *8*(1). Https://Doi.Org/10.24256/Kharaj.V8i1.8907

Solow, R. M. (1956). A Contribution To The Theory Of Economic Growth. *The Quarterly Journal Of Economics*, *70*(1), 65–94. Https://Doi.Org/10.2307/1884513

World Bank. (2023). *Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security*. World Bank. Https://Openknowledge.Worldbank.Org/Entities/Publication/Ec376c89-4c85-41a1-817c-A3bbadf421ed

Zufarulhaq, M. S., & Damayati, A. (2025). Kutukan Sumber Daya Atau Katalis Kesejahteraan: Bagaimana Dampak Hilirisasi Nikel Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi? *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, *20*(1), Article 2. Https://Doi.Org/10.7454/Jke.V20i1.1157